

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT**



Secara substantif kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pada hakekatnya bertujuan untuk :



- a. Meningkatkan kuantitas produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berbasis IPTEK;
- b. Meningkatkan konsumsi ikan menuju swasembada pangan protein hewani dengan jalan memasyarakatkan makan ikan;
- c. Meningkatkan nilai tambah dan mutu/kualitas hasil perikanan; dan
- d. Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan serta dengan melihat tantangan, peluang dan kendala yang ada, maka diterapkan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan masyarakat perikanan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dititik beratkan pada upaya pembinaan dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat kelautan dan perikanan di dalam pembangunan. Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Jawa Barat.

Disamping program-program yang telah disampaikan di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat juga berusaha mendorong pengembangan usaha komersial yang berorientasi pasar, meningkatkan dan memperluas keanekaragaman produksi ikan. Upaya tersebut dipandang penting untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan industri, serta meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan, langkah tersebut diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta ikut memelihara kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.



### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berpijak dari pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan perikanan Jawa Barat, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang substantif terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat**

| Aspek Kajian                    | Capaian/Kondisi Saat Ini  | Standar yang Digunakan   | Faktor Yang Mempengaruhi   |   | Permasalahan Pelayanan OPD   |
|---------------------------------|---|--|--|---|--|
|                                 |   |  | Internal   | Eksternal   |  |
| (1)                             | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   | (6)  |
| <b>Gambaran Pelayanan Dinas</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Perikanan (5%/thn)</li> <li>2. Peningkatan Konsumsi ikan (3.5%/thn)</li> <li>3. Peningkatan ekspor hasil perikanan (10%/thn)</li> <li>4. Peningkatan kesempatan berusaha (2.5%/thn)</li> <li>5. Peningkatan pendapatan rata-rata kotor nelayan dan pembudidaya (7.5%/thn)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran produksi</li> <li>2. Ketersediaan ikan</li> <li>3. Jumlah sertifikat HCCP yang dikeluarkan.</li> <li>4. Sasaran Jumlah RTP</li> <li>5. Sasaran pendapatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dukungan anggaran</li> <li>2. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>3. Ketersediaan jumlah petugas lapangan (penyuluh, PPTK, penyuluh swasembada)</li> <li>4. Penguatan kelembagaan kelautan dan perikanan</li> <li>5. Belum optimalnya sumber daya aparatur yang menangani masalah-masalah teknis kelautan dan perikanan.</li> <li>6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan sektor kelautan dan perikanan.</li> <li>7. Masih belum selarasnya penyesuaian Tupoksi UPTD dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan.</li> <li>8. Penerapan teknologi kelautan dan perikanan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya PKS (Pengetahuan, ketrampilan dan sikap) Pembudidaya dan nelayan</li> <li>2. Masih terbatasnya jenis dan volume sarana dan prasarana pengolahan.</li> <li>3. Masih lemahnya manajemen pengelolaan di tingkat pembudidaya dan nelayan</li> <li>4. Menurunnya luasan dan kualitas ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan, baik di kawasan pesisir, maupun kawasan perairan laut.</li> <li>5. Belum optimalnya ketersediaan input produksi, seperti : induk, benih, pakan, maupun teknologi dan sarana prasaran penunjang.</li> <li>6. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengadopsi teknologi budidaya dan penangkapan ikan, sebagai implikasi karakteristik masyarakat perikanan.</li> <li>7. Rendahnya kualitas dan kuantitas penunjang sarana dan prasarana budidaya, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran</li> <li>8. Rendahnya tingkat penguasaan pasar,</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi kelautan dan perikanan</li> <li>2. Belum padunya antar sector dalam menunjang pembangunan kelautan dan perikanan</li> <li>3. Kondisi infrastruktur jalan produksi belum memadai</li> <li>4. Peningkatan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan</li> <li>5. Belum selarasnya kebijakan pemanfaatan ruang dengan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan</li> <li>6. Pengelolaan sistem anggaran belum proporsional</li> <li>7. Rendahnya dukungan sektor lainnya dalam pengembangan budidaya dan penangkapan ikan, terutama yang berkaitan dengan permodalan dan teknologi aplikatif, dan</li> <li>8. Lemahnya tingkat keamanan dan jaminan kepastian hukum dalam</li> </ol> |



|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>mencakup penguasaan informasi, segmentasi pasar, jenis produk dan mutu komoditas perikanan, serta akses terhadap permodalan. (seperti : jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya air tawar, prasarana TPI/PPI, serta sarana penangkapan dan budidaya ikan di laut).</p> <p>9. Isu pemanfaatan bahan pengawet terhadap produk perikanan, yang dapat mengganggu stabilisasi tingkat konsumsi bahan perikanan.</p> <p>10. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal nilai strategis sumber daya kelautan dan perikanan, yang berimplikasi pada lemahnya apresiasi masyarakat untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut.</p> | <p>pengembangan budidaya dan penangkapan perikanan.</p> <p>9. Tingginya aktivitas sektor lainnya, yang bermuara pada terganggunya usaha pengembangan kelautan dan perikanan.</p> |
|--|--|--|--|---|--|

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada Tabel 3.1, maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kelautan dan perikanan, yang berdaya saing dan berbasis iptek.
- 2) Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap SDM dalam pengelolaan potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 3) Peningkatan penerapan teknologi kelautan dan perikanan.
- 4) Peningkatan akses pembudidaya/nelayan/pengolah dan pemasar hasil perikanan terhadap permodalan dan investasi.
- 5) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelautan dan perikanan serta Peningkatan peran kelembagaan dalam pengembangan ekonomi berbasis perikanan lokal yang berdaya saing
- 6) Peningkatan nilai tambah dan mutu hasil kelautan dan perikanan
- 7) Pemanfaatan peluang pasar regional dan global.
- 8) Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.
- 9) Peningkatan sinergitas antar unit kerja sektor kelautan dan perikanan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **a. Visi Pembangunan Jawa Barat**

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013–2018 adalah sebagai berikut :

***“Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”***

#### **b. Misi Pembangunan Jawa Barat**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing**
- 2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**
- 3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik**
- 4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan**
- 5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2013-2018, merupakan tahapan kedua dalam skenario Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2005-2025.

Orientasi pembangunan jangka menengah tersebut adalah pada pembangunan dan peningkatan

kompetensi segenap potensi sumber daya dalam segala bidang, guna memantapkan pembangunan secara menyeluruh.



Kondisi tersebut akan dapat tercapai melalui penciptaan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, serta meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan

tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Pada posisi ini, kemampuan sektor ekonomi dalam konteks penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Itulah sebabnya kemudian, kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi lokal. Hal ini dipandang penting untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Berbagai langkah strategis dapat dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Dalam hal kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, serta optimalisasi atas berbagai kebutuhan actual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi. Dan Kabupaten/Kota terutama merespon 14 (empat belas) prioritas Pembangunan Nasional, 10 (sepuluh) *Common Goals* baik kegiatan Tematik Sektoral maupun Tematik Kewilayahan serta Pengarusutamaan Gender yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan perikanan adalah Misi Kedua yaitu : “Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan”, disamping misi lainnya yang juga menjadi dampak dari keberhasilan pencapaian misi kedua tersebut. Pencapaian misi tersebut dimanifestasikan dalam kebijakan program dan kegiatan tahunan, dalam skenario pencapaian pembangunan jangka menengah.

Dokumen rencana pembangunan jangka menengah disamping sebagai arah pembangunan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Barat, juga merupakan pernyataan politis Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang selanjutnya menjadi

pedoman bagi pemangku kepentingan itu sendiri, terutama unit kerja pemerintah daerah yang dimanifestasikan dalam dokumen rencana program dan kegiatannya. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan satu kesatuan dalam skenario pembangunan Jawa Barat, dimana program prioritas selama periode waktu tahun 2013 – 2018 yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah serta berkaitan dengan implikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

### **1. Bidang Ketenagakerjaan**

- a. Penyediaan 2 juta lapangan kerja.

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

### **2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

- a. Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah.
- b. Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran yang disesuaikan per tahun (Komitmen Moral dengan batas waktu pelaksanaan tiga tahun masa kepemimpinan).
- c. Mencetak seratus ribu wirausahawan baru.

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan bidang, dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan bagi Calon Wirausahawan Baru sektor kelautan dan perikanan.

### **3. Bidang Pertanian**

- a. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan pertanian.



Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan bidang, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan nilai produksi dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan melalui pendekatan Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan dan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis.

Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Program yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi disusun berdasarkan sasaran misi kedua dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, yang menjadi dasar implikasi kebijakan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. **Bidang Ketenagakerjaan** melalui kebijakan dan program Perluasan kesempatan kerja, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
2. **Bidang Kelautan dan Perikanan** melalui kebijakan dan program Meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan dan flasma nutfah di perairan tawar, payau serta sumber daya kelautan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
  - a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan sasaran:
    - 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya.

- 2) Terkendalinya ketersediaan dan kontinuitas benih dan induk ikan berkualitas
  - 3) Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pembudidaya ikan
  - 4) Meningkatnya peran penyuluh perikanan budidaya
  - 5) Berkembangnya kawasan budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut, secara efektif, efisien dan berwawasan lingkungan
  - 6) Berkembangnya teknologi budidaya perikanan
  - 7) Terkendalinya wabah dan serangan hama penyakit ikan
  - 8) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya ikan, plasma nutfah dan habitat perikanan budidaya
  - 9) Terfasilitasinya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan budidaya
  - 10) Terfasilitasinya pengolahan dan pemasaran produk perikanan budidaya
  - 11) Meningkatnya kualitas peran kelembagaan agribisnis perikanan budidaya.
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap.
  - 2) Berkembangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
  - 3) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan.
- c. Program Pemasaran dan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran :
- 1) Peningkatan hasil dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.
  - 2) Penguatan kelembagaan dan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

- d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran :
  - 1) Peningkatan pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan
  - 2) Terkendalinya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- e. Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran :
  - 1) Pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan
  - 2) Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil
  - 3) Terjaganya plasma nutfah sumberdaya kelautan dan perikanan

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersaji dalam tabel 3.2 dibawah ini:

| Tabel 3.2<br>Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Visi : Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua   |   |  |   |   |
| No   | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih               | Permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jabar  | Faktor  |   |
|  |   |  | Penghambat  | Pendorong   |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   | (5)   |
|  | Misi 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan |  |   |   |
| 1.   | Program 1. Pengembangan Budidaya Perikanan                | a. Peran dan fungsi UPTD belum optimal.<br>b. Ketersediaan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan<br>c. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan<br>d. Kurangnya tenaga penyuluh perikanan di Provinsi | a.Harga input produksi yang tinggi dan kualitas yang rendah<br>b.Semakin tingginya alih fungsi lahan<br>c.Terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai dengan perkembangan teknologi budidaya<br>d.Menurunnya luasan dan kualitas ekosistem sumberdaya perikanan, baik perairan tawar, payau, kawasan pesisir, maupun kawasan perairan laut<br>e.Penerapan teknologi budidaya ikan terbatas | a. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kemandirian pangan<br>b. Inovasi dan introduksi teknologi perikanan budidaya<br>c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perikanan<br>d. Konsolidasi UPTD, OPD dan Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>e. Optimalisasi Sistem Perbenihan<br>f. Dukungan Anggaran yang memadai<br>g. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan perikanan yang tepat manfaat dan sasaran |



|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   | f. Rendahnya Pengetahuan, Keterampilan dan sikap pembudidaya  |   |
| 2. | Program 2.<br>Pengembangan Perikanan Tangkap   | a. Peran dan fungsi UPTD belum optimal.<br>b. Ketersediaan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan<br>c. Tidak adanya tenaga penyuluh perikanan tangkap | a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai dengan perkembangan teknologi penangkapan<br>b. Struktur armada masih tradisional Penerapan teknologi penangkapan terbatas<br>c. Belum optimalnya Pelabuhan Perikanan<br>d. Rendahnya Pengetahuan, Keterampilan dan sikap nelayan | a. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kemandirian pangan<br>b. Inovasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap<br>c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perikanan Konsolidasi UPTD, OPD dan Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>d. Dukungan Anggaran yang memadai<br>e. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan perikanan yang tepat manfaat dan sasaran   |
| 3. | Program 3 :<br>Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | a. Belum meratanya penerapan teknologi untuk pengolahan hasil kelautan dan perikanan<br>b. Rendahnya akses pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan terhadap informasi pasar  | a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan<br>b. Daya saing produk perikanan masih rendah.<br>c. Penerapan teknologi pengolahan belum optimal<br>d. Rendahnya Pengetahuan, Keterampilan dan sikap pengolah dan pemasar produk hasil perikanan   | a. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kemandirian pangan<br>b. Konsolidasi UPTD, OPD dan Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>c. Dimilikinya Lab Mutu Pengujian hasil perikanan.<br>d. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan perikanan yang tepat manfaat dan sasaran<br>e. Inovasi dan introduksi teknologi pengolahan hasil perikanan<br>f. Peningkatan akses informasi dan akses pasar bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan<br>g. Dukungan Anggaran yang memadai |
| 4  | Program 4 :<br>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                    | a. Peran dan fungsi UPTD belum Optimal<br>b. Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) oleh kapal-kapal ikan asing<br>c. adanya kebijakan pemanfaatan perairan Indonesia sangatterbuka(open access)                    | a. Terbatasnya sarana dan prasarana, SDM Pengawasan SDKP dan Kelembagaan Pengawasan SDKP  | a. Komitmen pimpinan dalam peningkatan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan<br>b. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan perikanan yang tepat manfaat dan sasaran<br>c. Dukungan anggaran yang memadai  |
| 5. | Program 5 :<br>Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan   | a. Menurunnya luasan dan kualitas ekosistem sumberdaya perikanan, baik di   | a. Tingginya aktivitas sektor lainnya, yang bermuara pada terganggunya usaha  | a. Komitmen pimpinan dalam peningkatan pengawasan, pemulihan dan  |

|  |  |  |                                     |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
|  |  | perairan tawar, kawasan pesisir, maupun kawasan perairan laut<br>b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal nilai strategis sumber daya perikanan dan kelautan, yang berimplikasi pada lemahnya apresiasi masyarakat untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut | pengembangan perikanan dan kelautan | pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan<br>b. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan perikanan yang tepat manfaat dan sasaran<br>c. Dukungan anggaran yang memadai |
|--|--|--|-------------------------------------|--|

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional khususnya disektor pembangunan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi : **“Terwujudnya negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”**

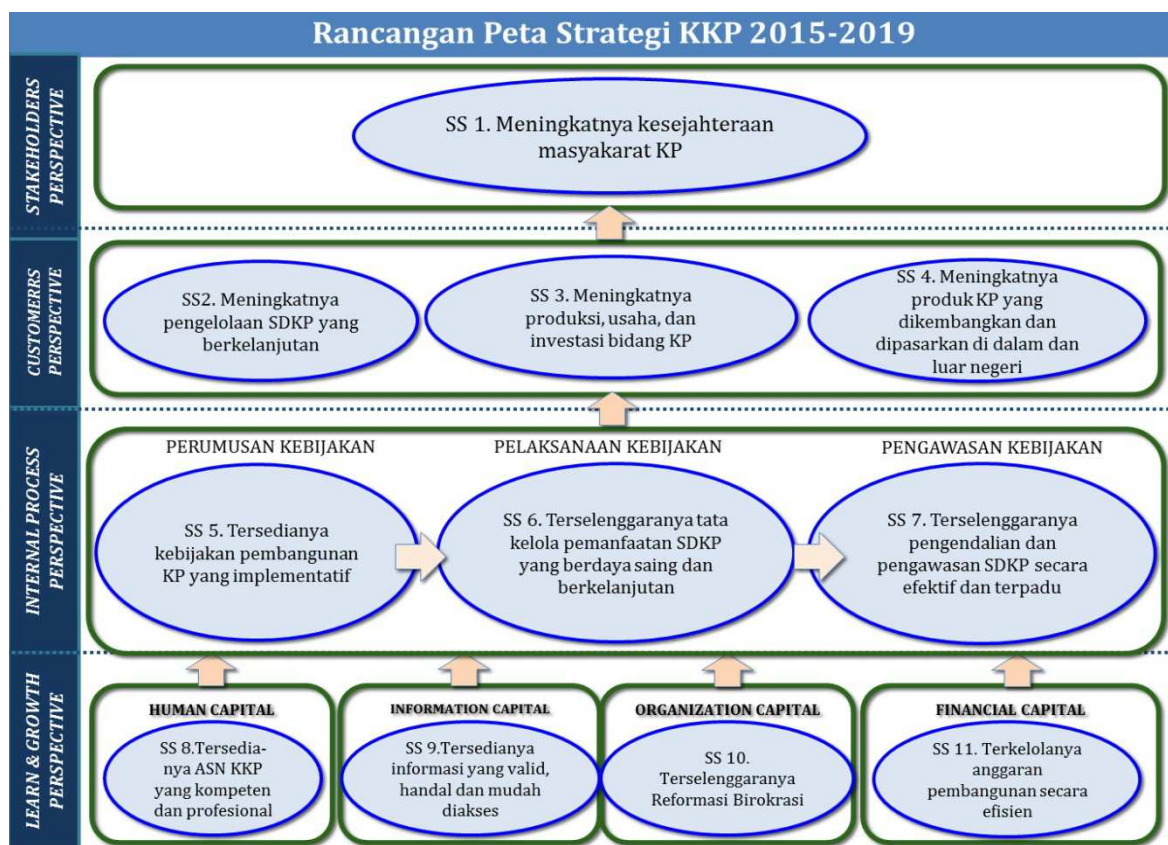
Hal ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Barat. Berkenaan dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka perlu dipedomani sebuah prinsip dasar, kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagai penjabaran Visi Misi pembangunan nasional dan KKP ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan tema arah kebijakan yang ditetapkan dan dibagi dalam empat perspektif.

**Gambar 3.1**  
**4 Perspektif Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan**



**Gambar 3.2**  
**Rancangan Peta Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019**



Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun tersebut adalah :

1. ***Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.***

Isu pembangunan global dalam beberapa dekade ke depan antara lain mewujudkan kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan secara global akan turut memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak akan dilakukan secara eksploitatif dan destruktif, melainkan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kelestarian lingkungan (*sustainable development*) dan penegakan hukum secara terpadu dan efektif.

2. ***Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.***

Daya saing bangsa merupakan salah satu kunci sukses guna memenangkan persaingan antar negara pada era perdagangan bebas. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 akan menjadi tonggak penting kebangkitan bangsa Indonesia sebagai negara maritim guna memainkan peran yang lebih menentukan dalam pembangunan ekonomi di kawasan. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat domestik maupun internasional terhadap produk kelautan dan perikanan yang bermutu akan berdampak besar bagi keberlanjutan pembangunan KP, baik pada aspek ekonomi, politik, sosial, maupun lingkungan.

3. ***Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif.***

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan upaya terencana guna mewujudkan perubahan kondisi kehidupan yang lebih baik pada masyarakat kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*) akan meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM KP dalam menerapkan hasil-hasil Iptek inovatif bagi kesejahteraan masyarakat KP secara keseluruhan.



4. ***Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.***

Pembangunan kelautan dan perikanan yang berwawasan *good governance* akan mampu mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi institusi yang adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis, inovatif, memiliki integritas tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat KP. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memiliki kapasitas organisasi yang mumpuni dalam menerapkan prinsip dan nilai dasar pemerintahan yang terbuka dan bersinergi dengan pemangku kepentingannya (*open governance partnership*), serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.

Adapun Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat tertuang dalam tabel 3.3 dibawah ini :

**Tabel. 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan perikanan**  
**Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota beserta**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L      | Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi   | Sebagai Faktor  |   |
|-----|--|---|---|---|
|     |  |   | Penghambat  | Pendorong   |
| (1) | (2)                                      | (3)   | (4)   | (5)   |
| 1   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP | 1. Peran dan fungsi UPTD masih belum optimal<br>2. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan<br>3. Ketersediaan SDM kelautan dan perikanan yang berdaya saing<br>4. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan<br>5. Peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan belum dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan global | 1. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap nelayan dan pembudidaya<br>2. Menurunnya minat generasi muda terhadap sector kelautan dan perikanan<br>3. Keterbatasan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan<br>4. Lemahnya Manajemen pengelola pembudidaya dan nelayan | 1. Komitmen pimpinan terhadap peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan<br>2. Revitalisasi UPTD<br>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perikanan |



| (1) | (2)   | (3)  | (4)   | (5)   |
|-----|---|--|---|---|
| 2   | Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya penataan dan pemetaan komoditas perikanan dengan kesesuaian potensi wilayahnya</li> <li>2. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal dan berkelanjutan</li> <li>3. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi belum optimal dikelola secara berkelanjutan</li> <li>4. Belum adanya pemetaan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>5. Kebijakan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan upaya pengembangan kelautan dan perikanan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal nilai strategis sumber daya kelautan dan perikanan, yang berimplikasi pada lemahnya apresiasi masyarakat untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut.</li> <li>2. Menurunnya luasan dan kualitas ekosistem sumberdaya perikanan, baik di perairan tawar, kawasan pesisir, maupun kawasan perairan laut;</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan</li> <li>2. Dukungan anggaran</li> <li>3. Program-program pembangunan yang mendukung terhadap penerapan prinsip <i>blue economy</i></li> </ol>   |
| 3   | Meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang KP   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknologi kelautan dan perikanan yang dapat bersaing dan ramah lingkungan</li> <li>2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan</li> <li>3. Usaha kelautan dan perikanan yang kurang bankable</li> <li>4. Daya saing produk ekspor yang masih elative rendah di pasar internasional</li> <li>5. Kualitas SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan masyarakat disektor pengolahan hasil masih kurang</li> <li>2. Aksesibilitas pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas</li> <li>3. Isu pemanfaatan bahan pengawet terhadap produk perikanan, yang dapat mengganggu stabilitas tingkat konsumsi bahan perikanan</li> <li>3. Kondisi pasar/TPI yang masih tradisional</li> <li>4. Penanganan ikan pascapanen/tangkap yang kurang baik</li> <li>5. Metode pengangkutan dan pengemasan ikan yang tidak tepat.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas hasil perikanan dan peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan yang berdaya saing</li> <li>2. Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan melalui pelatihan teknis.</li> <li>3. Kualitas dan kuantitas hasil perikanan terus meningkat sejalan dengan kemajuan IPTEK</li> <li>4. Dukungan anggaran.</li> </ol> |
| 4   | Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang implementatif | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan belum dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan global</li> <li>2. Kualitas SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan</li> </ol>   | <p>Kesadaran Masyarakat terhadap penerapan peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan masih kurang</p>   | <p>Program-program pembangunan yang mendukung terhadap penerapan peraturan</p>  |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   |
|-----|--|---|--|---|
| 5.  | Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan | Kurangnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan terhadap tata kelola pemanfaatan SDKP   | Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap nelayan dan pembudidaya                                    | 1. Komitmen pimpinan terhadap peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan<br>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat Kelautan Perikanan                               |
| 6   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara efektif dan terpadu       | 1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawas SDKP<br>2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan<br>3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan yang berbanding terbalik dengan luasnya cakupan pengawasan | Kesadaran Masyarakat terhadap penerapan peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan masih kurang | 1. Komitmen pimpinan dalam penegakan hukum dan pengendalian Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan |

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Jawa Barat tahun 2029 adalah : **“Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Provinsi yang Efisien, Berkelanjutan, dan Berdayasaing Menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Jawa Barat hendaknya mampu memberikan daya guna dan hasil guna sesuai arahan pemanfaatan ruang, untuk menjamin menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tetap mempertimbangkan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah baik antar kabupaten/kota

maupun antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah terdiri dari :

A. Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP)

Wilayah pengembangan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan merealisasikan rencana tata ruang, serta merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Andalan pada sistem nasional.

Strategi :

1. Menetapkan konsep pemerataan pengembangan wilayah
2. Menetapkan tema, fokus dan rencana pengembangan di setiap WP.

B. Pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar wilayah pengembangan (WP). Keterkaitan fungsional antar WP dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi antar WP, meliputi :

1. Kawasan yang terletak di bagian utara provinsi, mencakup WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Ciayumajakuning, menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya. Strategi mengendalikan pengembangan wilayah :
  - a) Memenuhi kebutuhan pelayanan perkotaan yang berdaya saing dan ramah lingkungan
  - b) Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan sawah
  - c) Menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi
  - d) Mengembangkan sistem transportasi massal

- e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN
  - f) Mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya alam.
2. Kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, mencakup sebagian Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung dan Wilayah Pengembangan Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya. Strategi mendorong pengembangan wilayah, meliputi :
- a) Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan RTRWP
  - b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa
  - c) Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah
  - d) Menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan
  - e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.
3. Kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, meliputi sebagian WP KK Cekungan Bandung, wilayah pengembangan Sukabumi dan sekitarnya serta wilayah

pengembangan Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya. Strategi membatasi pengembangan wilayah, meliputi:

- a) Mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan
- b) Meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan
- c) Meningkatkan akses menuju dan keluar kawasan
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman terutama di wilayah perbatasan
- e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN; dan
- f) Mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS.

4. Kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, meliputi sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya. Strategi meningkatkan pengembangan wilayah, meliputi:

- a) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan/jasa
- b) Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah
- c) Mengembangkan sistem transportasi massal

- d) Menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan
- e) Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat beserta factor penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel. 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah<br>Terkait Tugas dan Fungsi OPD   | Permasalahan<br>Pelayanan OPD  | Sebagai Faktor   |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | Penghambat   | Pendorong  |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  |
| 1.  | Wilayah Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodebekpunjur</li> <li>- Sukabumi</li> <li>- Ciayumajakuning</li> <li>- Purwasuka</li> <li>- Priangan Timur-Pangandaran</li> </ul> | 1. Alih fungsi lahan bukan menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat | 1. Pertumbuhan penduduk Jawa Barat yang setiap tahun meningkat serta tingkat urbanisasi penduduk dari luar Jawa Barat semakin meningkat<br>2. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan dan permukiman belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan usaha perikanan<br>3. Pemanfaatan Penerapan Teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal | a. Dijadikannya RTRW Provinsi sebagai dasar penyusunan RTRW kab/kota<br>b. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk |
| 2.  | Kawasan Budidaya Perikanan   |  |  |  |
| 3.  | Kawasan Konservasi   |  |  |  |

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat beserta factor

penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat**  
**berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

| No. | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD                                   | Permasalahan Pelayanan OPD   | Faktor   |  |
|-----|---|--|--|--|
|     |   |  | Penghambat   | Pendorong  |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  |
| 1.  | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Berkurangnya wilayah/kawasaan perikanan karena alih fungsi menjadi pemukiman                           | Belum tertatanya rencana tata ruang potensi kelautan dan perikanan               | Teknologi terapan terus berkembang sesuai potensi yang ada                   |
| 2.  | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup                     | Ketidak seimbangan penyediaan bahan pangan dengan pertambahan penduduk                                 | Berkurangnya lahan produktif yang dijadikan pemukiman                            | Berkembangnya teknologi intensifikasi dalam meningkatkan produksi ikan       |
| 3.  | Kinerja layanan/jasa ekosistem  | Belum adanya peraturan dan perundang undangan yang jelas dalam alih fungsi lahan                       | Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah | Kesadaran semua pihak dalam mengontrol resiko jasa ekosistem                 |
| 4.  | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam                                    | Program intensifikasi belum sepenuhnya didukung oleh sumber dana yang memadai dan teknologi tepat guna | Sumber daya anggaran dan modal yang dimiliki nelayan/pembudidaya masih terbatas  | Adanya program peningkatan usaha sudah dikurcurkan. KUR,KKP-E dan lain ,lain |
| 5.  | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim        | Resiko pada usaha intensifikasi Perikanan cenderung meningkat  | Terjadi kegagalan usaha akibat perubahan iklim yang ekstrim                      | Berkembangnya benih ikan yang unggul   |
| 6.  | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati                       | Ketersediaan teknologi diversifikasi usaha pada lahan yang ada terbatas                                | Berkurangnya lahan produktif untuk usaha perikanan                               | Disversifikasi pangan hasil perikanan  |

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan. Manakala hal tersebut tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara serius, sistematis dan komprehensif.

Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya kemudian isu strategis tersebut juga dapat menjadi bahan dalam mendesain skenario rencana pembangunan dan rencana pemanfaatan

ruang wilayah di Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan konteks tersebut, di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis, baik secara internal maupun eksternal terkait dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Barat sebagai berikut :

